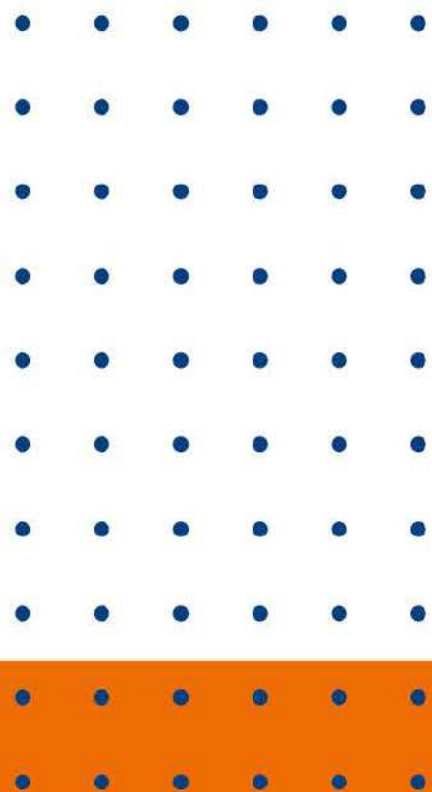


**2025**

# **RENCANA KERJA**

**Dinas Lingkungan Hidup  
Provinsi Sumatera Barat**



## Bab I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan hidup Tahun 2025, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Lingkungan Hidup yang disiapkan satu tahun sebelumnya adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sebagai dokumen rencana tahunan SKPD, Renja SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansi menterjemahkan arah kebijakan dan strategi SKPD 5 tahunan yang telah dirumuskan di dalam dokumen Renstra menjadi perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan dengan tetap mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Renja DLH tahun 2025 berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021-2026, yang memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah selama 5 tahun serta penjabarannya ke dalam program dan anggaran tahunan. Tujuan DLH yang termuat di dalam dokumen renstra dimaksud adalah mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, dengan sasaran:

- 1) Terwujudnya penataan lingkungan hidup,
- 2) terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup,
- 3) terwujudnya optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah B3.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renja SKPD adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
- 9) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 10) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
- 11) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 30);
- 12) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

- 13) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas LH adalah dokumen perencanaan Dinas untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, khususnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk mewujudkan rencana kerja tahunan yang konsisten, implementatif, dan menjadi tolak ukur penilaian kinerja, serta untuk mencapai harmonisasi perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2025.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan garis besar Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

#### 1. Bab I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Landasan Hukum
- c. Maksud dan Tujuan
- d. Sistematika Penulisan

#### 2. Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- a. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- b. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- c. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- d. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- e. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

#### 3. Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- a. Telaahan terhadap kebijakan nasional
- b. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

#### 4. Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### 5. Bab V PENUTUP

## **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas LH Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah TA 2024**

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Sejak tahun 2021 klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah sudah mengacu dan mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Di dalam pelaksanaannya Renja Dinas LH Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 secara umum dapat disimpulkan bahwa keseluruhan target-target yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, pada tahun 2023 Dinas LH Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 11 Program, 20 kegiatan dan 45 sub kegiatan, dengan perincian: 1 program penunjang urusan (8 kegiatan dan 21 sub kegiatan) dan 10 program urusan lingkungan hidup (12 kegiatan dan 24 sub kegiatan). Sementara itu alokasi anggaran belanja yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup pada tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp26.667.278.817 dan target pendapatan daerah yang dibebankan kepada Dinas LH adalah sebesar Rp4.281.250.000 (dari pengelolaan laboratorium LH, pemanfaatan incinerator dan KJP Pengelolaan Sampah pada TPA Regional Solok dan Payakumbuh).

Komponen pada program penunjang urusan umumnya berada pada dan dikelola oleh Sekretariat Dinas. Kegiatan dan sub kegiatan pada program ini pada umumnya bersifat pendukung untuk kelancaran dan optimalnya pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan urusan LH, misalnya seperti penyusunan dokumen perencanaan, penyediaan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan logistik/sarana/prasarana/perlengkapan kantor, sumber daya air dan listrik, pemeliharaan sarana/prasarana umum dan lain-lain. Sementara itu untuk 10 program, 12 kegiatan dan 24 sub kegiatan urusan lingkungan hidup terealisasi secara fisik dengan capaian 100% sesuai yang ditargetkan.

Kinerja keuangan pada umumnya juga dapat dicapai dengan baik dengan persentase serapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp25.458.588.232 (95,47%) dan pencapaian target pendapatan daerah sebesar Rp3.499.040.200 (81,73%). Adapun kurangnya realisasi serapan anggaran pada beberapa sub kegiatan hingga mencapai 10% lebih didominasi disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran.

Rincian realisasi kinerja program tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rincian realisasi kinerja program tahun 2023

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target	Realisasi
2.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
2.11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup				
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase kesesuaian antara dokumen rencana dengan implementasi	%	100	100
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan	%	65	76,54
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Jumlah kab/kota yang telah terdata potensi dan pemanfaatan keanekaragaman hayatinya	Kab. / Kota	19	19
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase penanganan Limbah B3	%	100	100
2.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase cakupan izin lingkungan dan izin PPLH yang dapat dibina dan diawasi	%	50	57,64
2.11.07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	Persentase pemenuhan data MHA dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	%	100	100
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi yang telah mengikuti pendidikan/pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	%	75	76
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang Mendapatkan penghargaan di bidang lingkungan hidup	%	10	25,7
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan	%	90	91
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	%	65	66,54

Sementara itu untuk realisasi serapan anggaran per program adalah

sebagaimana tabel 2.2 berikut

Tabel 2.2. Serapan anggaran per program

No	PROGRAM	PAGU DANA (Rp)	REALISASI KEUANGAN	
			Rp	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.222.883.622	12.586.735.953	95,19
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	282.610.937	262.611.750	92,92
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LH	1.035.004.723	1.007.939.148	97,38
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	54.188.136	52.856.500	97,54
5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH B3	1.943.859.397	1.868.965.177	96,15
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	107.303.777	105.235.240	98,07
7	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA). KEARIFAN LOKAL & HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	25.000.000	24.141.000	96,56
8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN. PELATIHAN & PENYULUHAN LH UNTUK MASYARAKAT	5.128.317.558	4.735.076.300	92,33
9	PROGRAM PENGHARGAAN LH UNTUK MASYARAKAT	181.851.184	181.633.860	99,88
10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	60.787.476	59.953.082	98,63
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4.625.472.007	4.573.440.222	98,88
	TOTAL	26.667.278.817	25.458.588.232	95,47

Pada tahun 2023 keseluruhan dari 11 program, 20 kegiatan dan 45 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh DLH realisasi fisiknya mencapai 100% dan untuk keuangan, realisasi secara keseluruhan adalah 95,47%. Sungguhpun demikian terdapat tiga sub kegiatan yang serapan anggarannya kurang dari 90%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan realisasi keuangan 75,63%;
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan realisasi keuangan 88,75%
3. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan realisasi keuangan 82,79%.

Ketiga sub kegiatan tersebut di atas merupakan sub kegiatan yang bersifat penunjang. Rendahnya realisasi keuangan ketiga sub kegiatan ini tidak mencerminkan rendahnya realisasi fisik. Capaian fisik sub kegiatan ini berhasil dicapai 100% dan kelebihan anggaran merupakan gambaran efisiensi anggaran

yang dicapai pada akhir tahun.

Secara detail, hasil pelaksanaan Renja DLH Tahun anggaran 2023 dan capaian Renstra DLH sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2-3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024.



Tabel. 2.3

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( outcome )/Kegiatan( output )	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)											
							-5		-6		-7		-8				-9		-10		-11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 *		(14) = 6+12		(15) = 14/5 *	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		DINAS LINGKUNGAN		22.340.052.000	24.524.954.869	22.838.231.000	2.796.970.849	0	0	0	0	0	0	0	0	2.796.970.849	12,25	27.321.925.718	122,3											
X		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	nan											
X.XX		PENUNJANG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	nan											
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN		22.340.052.000	24.524.954.869	22.838.231.000	2.796.970.849	0	0	0	0	0	0	0	0	2.796.970.849	12,25	27.321.925.718	122,3											
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN		22.340.052.000	24.524.954.869	22.838.231.000	2.796.970.849	0	0	0	0	0	0	0	0	2.796.970.849	12,25	27.321.925.718	122,3											
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		12.791.250.000	12.292.064.697	0	13.393.359.000	2.190.901.827	0	0	0	0	0	0	0	2.190.901.827	nan	16,36	0	14.482.968.524	nan	113,23								
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0	13.000.000	0	26.806.500	0	53.798.400	0	6.100.000	0	0	0	0	0	6.100.000	nan	11,34	0	32.906.500	nan	253,13							
1	2.11.01.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	8.000.000	2	24.941.500	2	48.798.400	0	6.100.000		0	0	0	6.100.000	0	12,5	2	31.041.500	100	388,02							
2	2.11.01.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Laporan	3	5.000.000	3	1.865.000	3	5.000.000	0	0		0	0	0	0	0	0	3	1.865.000	100	37,3							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					100	212,66								
Predikat Kinerja																					ST	ST								





No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( outcome )/Kegiatan[ output ]	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)								
							I		II		III		IV						(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/17 *		(14) = 6+12		(15) = 14/15 *	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
13	2.11.011.06.0002	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	250.000.000	1	11.672.000	5	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11.672.000	8,33	4,67			
14	2.11.011.06.0004	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	75.000.000	5	49.985.000	4	100.000.000	0	756.500	0	0	0	0	0	756.500	0	0,76	5	50.741.500	41,67	67,66		
15	2.11.011.06.0005	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	30.000.000	7	17.700.000	5	30.000.000	1	1.785.000	0	0	0	0	1	1.785.000	20	5,95	8	19.485.000	66,67	64,95		
16	2.11.011.06.0006	Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	10.000.000	3	9.940.000	3	10.000.000	3	1.540.000	0	0	0	0	3	1.540.000	100	15,4	6	11.480.000	150	114,8		
17	2.11.011.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan	21	350.000.000	62	753.874.972	35	265.273.410	10	129.126.571	0	0	0	0	10	129.126.571	28,57	48,68	72	883.001.543	342,86	252,29		
18	2.11.011.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	10	20.000.000	0	0	1	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					37,57		38,18			
Predikat Kinerja																					SR		SR			
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	-	-	0	250.000.000	0	99.199.880	0	34.976.700	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	0	99.199.880	nan	39,68		
19	2.11.011.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	15	250.000.000	12	99.199.880	4	34.976.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	99.199.880	80	39,68			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					4,21		2,09			
Predikat Kinerja																					SR		SR			



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( outcome )/Kegiatan( output )	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)			
					-5		-6		-7		I -8		II -9		III -10		IV -11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/17 *		(14) = 6-12		(15) = 14/5 *	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
26	2.11.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	27	30.000.000	0	0	28	33.383.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	2.11.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	150.000.000	0	0	1	130.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						9,36	9,16			
Predikat Kinerja																						SR	SR			
	2.11.02	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Persentase kesesuaian antara dokumen rencana dengan implementasi	%		238.207.000	242.447.250	100	525.000.000	12.257.000	0	0	0	0	0	0	12.257.000	0	2,33	0	254.704.250	nan	106,93			
	2.11.02.1.01	<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>	Persentase pengendalian dan pelaksanaan RPPLH Provinsi	%	100	100.000.000	55.914.500	100	50.000.000	1.340.000	0	0	0	0	0	0	1.340.000	0	2,68	0	57.254.500	0	57,25			
1	2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir	Dokumen	19	100.000.000	55.914.500	1	50.000.000	1.340.000	0	0	0	0	0	1.340.000	0	2,68	2	57.254.500	10,53	57,25				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						10,53	57,25			
Predikat Kinerja																						SR	R			
	2.11.02.1.02	<b>Pengelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi</b>	Jumlah KLHS yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah	dokumen	100	138.207.000	186.532.750	1	475.000.000	10.917.000	0	0	0	0	0	10.917.000	0	2,3	0	197.449.750	0	142,87				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( outcome )/Kegiatan( output )	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)					
							I		II		III		IV						(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/17 *	(14) = 6+12	(15) = 14/15 *	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
2	2.11.02.1.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang	Dokumen	1	25.000.000	1	186.532.750	1	425.000.000	0	6.982.000	0	0	0	0	6.982.000	0	1,64	1	193.514.750	100	774,06
3	2.11.02.1.02.0005	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan	Dokuman	0	0	0	5	50.000.000	0	3.935.000	0	0	0	0	0	3.935.000	0	7,87	0	3.935.000	nan	inf
4	2.11.02.1.02.0007	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan	Dokumen	1	113.207.000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	0	0	0	0
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	inf
Predikat Kinerja																						-	-
	2.11.03	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/TATAU KERUSAKAN</b>	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang	%		1.255.715.000	699.650.125	70	1.801.683.000	97.914.559	0	0	0	0	0	97.914.559	0	5,43	0	797.564.684	nan	63,51	
	2.11.03.1.01	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	Persentase sumber pencemaran/kerusakan yang diawasi dalam rangka pencegahan	%	100		0	100	0	1.791.683.000	0	97.914.559	0	0	0	0	97.914.559	nan	5,46	0	796.274.684	nan	63,41

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( outcome )/Kegiatan( output )	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)								
					-5			-6		-7		I		II						III		IV		(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/17 *	(14) = 6+12	(15) = 14/15 *
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang	Dokumen	1	150.000.000	0	1	100.000.000	0	5.460.000	0	0	0	0	0	0	5.460.000	0	5,46	0	5.460.000	0	3,64			
2	2.11.03.1.01.0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem	Lokasi	0	0	0	19	350.000.000	0	11.630.000	0	0	0	0	0	0	11.630.000	0	3,32	0	11.630.000	nan	inf			
3	2.11.03.1.01.0012	Pengusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Dokumen	0	0	0	1	125.000.000	0	3.015.000	0	0	0	0	0	0	3.015.000	0	2,41	0	3.015.000	nan	inf			
4	2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi [UPTD Laboratorium Lingkungan]	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dokumen	0	1.105.715.000	0	698.360.125	115	1.216.683.000	15	77.809.559	0	0	0	0	15	77.809.559	13,04	6,4	15	776.169.684	inf	70,2			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	inf				
Predikat Kinerja																						-	-				
	2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang	%	0,02	0	0	1.290.000	0,002	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.290.000	0	inf			





No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( outcome )/Kegiatan( output )	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)	
				-5		-6		-7		I -8		II -9		III -10		IV -11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/17 *		(14) = 6-12		(15) = 14/5 *	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2.11.05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN</b>	Persentase penanganan Limbah B3	%	3.191.975.000	1.868.965.177	100	2.130.930.000	41.225.001	0	0	0	0	0	0	0	41.225.001	0	1,93	0	1.910.190.178	nan	59,84		
	2.11.05.1.01	<b>Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	Persentase pemenuhan ketentuan pengelolaan limbah B3 oleh usaha dan/atau kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai	%	3.191.975.000	1.868.965.177	75	2.130.930.000	0	41.225.001	0	0	0	0	0	0	41.225.001	0	1,93	0	1.910.190.178	0	59,84		
1	2.11.05.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Dokumen	1	80.000.000	1	21.647.250	1	30.000.000	0	1.240.000	0	0	0	0	1.240.000	0	4,13	1	22.887.250	100	28,61		
2	2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan [UPTD Pengelolaan Limbah B3 Medis]	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan,	Dokumen	0	3.111.975.000	0	1.847.317.927	1	2.100.930.000	0	39.985.001	0	0	0	0	39.985.001	0	1,9	0	1.887.302.928	nan	60,65		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	44,63		
Predikat Kinerja																						-	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( outcome )/Kegiatan[ output ]	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)	
				-5		-6		-7		I -8		II -9		III -10		IV -11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/17 *		(14) = 6+12		(15) = 14/15 *	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2.11.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN</b>	Persentase cakupan izin lingkungan dan izin PPLH yang dapat dibina dan diawasi	%	135.000.000	82.168.940	50	180.000.000	6.885.900	0	0	0	0	0	0	6.885.900	0	3,83	0	89.054.840	nan	65,97			
	2.11.06.1.01	<b>Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah</b>	Persentase tingkat ketaatan usaha dan/atau kegiatan dari jumlah yang diawasi	%	70	82.168.940	70	180.000.000	0	6.885.900	0	0	0	0	0	6.885.900	0	3,83	0	89.054.840	0	65,97			
1	2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasinya	Dokumen	0	16.679.940	15	95.000.000	0	255.000	0	0	0	0	0	255.000	0	0,27	0	16.934.940	nan	42,34			
2	2.11.06.1.01.0005	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0	0	nan	nan			
3	2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan Usaha	4	65.489.000	6	85.000.000	0	6.630.900	0	0	0	0	0	6.630.900	0	7,8	11	72.119.900	275	75,92			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					nan	nan			
Predikat Kinerja																					-	-			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> )/Kegiatan( <i>output</i> )	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		
				-5		-6		-7		I		II		III		IV							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/17 *
	2.11.07	<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT</b>	Persentase pemenuhan data MHA dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	%	54.669.000	24.141.000	100	70.387.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.141.000	nan	44,16
	2.11.07.1.01	<b>Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</b>	Jumlah calon MHA yang dilakukan identifikasi, verifikasi dan validasi subjek dan objek Masyarakat Hukum Adat	kelompok masyarakat	3	39.669.000	0	35.387.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2.11.07.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Pengediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Pengediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Dokumen	0	39.669.000	0	35.387.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	0
Predikat Kinerja																						-	SR

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( <i>outcome</i> )/Kegiatan( <i>output</i> )	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)	
				-5		-6		-7		-8		-9		-10		-11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/17 *		(14) = 6+12		(15) = 14/5 *	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
-1	-2	-3	-4																						
	2.11.07.1.02	<b>Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait</b>	Jumlah kelompok MHA yang diberikan penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis atau kelompok masyarakat	1	15.000.000	0	24.141.000	1	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.11.07.1.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan,		15.000.000	0	24.141.000	1	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							nan	80,47	
Predikat Kinerja																							-	T	
	2.11.08	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK</b>	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi yang telah mengikuti pendidikan/pelatih	%	270.311.000	4.890.902.160	75	200.000.000	26.673.000	0	0	0	0	0	0	0	26.673.000	0	13,34	0	4.917.575.160	nan	1.819,23		
	2.11.08.1.01	<b>Pengelolaan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah</b>	Jumlah Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah	kali	7	270.311.000	0	4.890.902.160	6	200.000.000	0	26.673.000	0	0	0	0	0	26.673.000	0	13,34	0	4.917.575.160	0	1.819,23	





No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( outcome )/Kegiatan( output )	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)			
					-5		-6		-7		I -8		II -9		III -10		IV -11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/17 *		(14) = 6-12		(15) = 14/5 *	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang	Pengaduan	0	119.104.000	22	59.953.082	6	75.000.000	0	8.225.000	0	0	0	0	0	8.225.000	0	10,97	22	68.178.082	inf	57,24		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	inf			
Predikat Kinerja																						-	-			
	2.11.11	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	-	-	0	4.020.000.000	0	4.130.172.078	0	4.134.048.000	0	377.640.902	0	0	0	0	0	377.640.902	nan	9	0	4.507.812.980	nan	112,13		
			Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	%					70								0		0				nan			
	2.11.11.1.01	<b>Penanganan Sampah di</b>	-	-	0	4.020.000.000	0	4.130.172.078	0	4.134.048.000	0	377.640.902	0	0	0	0	0	377.640.902	nan	9	0	4.507.812.980	nan	112,13		
			Persentase sampah terkelola di TPA/TPST	%	100		0		100		0		0	0	0	0	0		0		0		0			
1	2.11.11.1.01.0002	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional [UPTD Persampahan]	Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional	Ton	0	0	0	85000	2.847.329.617	0	350.894.385	0	0	0	0	0	350.894.385	0	12,32	0	350.894.385	nan	inf			
2	2.11.11.1.01.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional [UPTD Persampahan]	Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	2	4.000.000.000	2	4.123.351.178	2	1.252.670.383	2	22.336.517	0	0	0	0	22.336.517	100	1,78	4	4.145.687.695	200	103,64			
3	2.11.11.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional [UPTD Persampahan]	Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST	Dokumen	1	20.000.000	1	6.820.900	1	44.048.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6.820.900	100	34,1			



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( outcome )/Kegiatan ( output )	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)							
					-5		-6		-7		I		II			III		IV		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 *		(14) = 6+12		(15) = 14/5 *	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4	2.11.11.1.010014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Dokuman	0	0	0	0	1	50.000.000	0	4.410.000	0	0	0	0	0	4.410.000	0	8,82	0	4.410.000	nan	inf			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						nan	inf				
Total																						.	.				

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah dengan beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangannya;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Lingkungan Hidup; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat dari IKU berdasarkan cascading yang telah ditetapkan. Capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Sampai Dengan Tahun 2023

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan	-	-	77	82	93	96	99	86,45	107,94	110			
2.	Persentase penurunan beban	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,99	2,74	-			
3	Persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan	-	-	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,15	-			
4	Persentase penanganan sampah	-	-	56	58	60	62	64	50,19	52,06	-			
5	Persentase pengurangan sampah	-	-	17	19	21	23	25	16,18	16,51	-			
6	Jumlah Limbah B3 yang dikelola (ton/tahun)	-	-	261.290	287.419	316.160	347.776	382.554	298.983	313.914	-			
7	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	-	-	78	78,2	78,4	78,6	78,8	78,92	80,96	80			
8	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	-	-	80%	85%	88%	90%	93%	88,62	88,68	88			

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Dari hasil analisis terhadap gambaran pelayanan OPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD maupun hasil kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra OPD, maka selanjutnya dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD, untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dan untuk menentukan peluang dan tantangan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

Merujuk kepada dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat periode 2021 – 2026 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat 2021 – 2026, telah dirumuskan isu strategis berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah:

1. Pencemaran air. Isu ini antara lain dilatarbelakangi oleh meningkatnya pertumbuhan infrastruktur dan ekonomi (misalnya industri sawit), meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pemukiman, meningkatnya luas lahan, meningkatnya produktivitas perikanan darat dan peternakan aktifitas pembuangan limbah industri dan limbah rumah tangga ke sungai, kurangnya komitmen pemda dalam pengawasan dan kebijakan tata ruang yang buruk.
2. Persampahan dan limbah B3. Isu ini didorong oleh beberapa faktor, seperti peningkatan jumlah penduduk, meningkatnya penggunaan bahan sekali pakai (tidak guna ulang), aktifitas fasyankes, kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku industri, budaya malas, isu sampah tidak menjadi perhatian serius bagi pemerintah, berkembangnya program pengembangan pariwisata, kurangnya kesadaran pemerintah terhadap pengelolaan sampah dan tidak adanya penegakan hukum.
3. Alih fungsi dan kerusakan lahan dan penurunan tutupan hutan. Isu ini berkembang akibat dari beberapa faktor, antara lain akibat aktifitas pertambangan, peningkatan jumlah kebutuhan perumahan, pembukaan lahan baru dari masyarakat untuk perkebunan, investasi ekstraktif, politik ekonomi tidak pro konservasi, industrialisasi skala besar dan kebijakan pemerintah yang mendukung, misal kebijakan pembangunan 1 juta rumah bersubsidi.

### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 masih harus disesuaikan dengan kebutuhan Dinas LH Provinsi Sumatera Barat. Review lengkap terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5

Review terhadap konsep rancangan awal  
RKPD Tahun 2025 Provinsi Sumatera Barat

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>				<b>15.296.486.000</b>		<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>				<b>15.910.411.000</b>
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				15.296.486.000	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				15.910.411.000
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				15.296.486.000	2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				15.910.411.000
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				13.215.112.000	2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				13.215.619.000
2 11 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				62.000.000	2 11 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				62.000.000
2 11 01 1.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 11 01 1.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Sumbar	2 Dokumen	7.000.000		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Sumbar	2 Dokumen	7.000.000
2 11 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD					2 11 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Sumbar	1 Dokumen	5.000.000		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Sumbar	1 Dokumen	5.000.000
2 11 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					2 11 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Sumbar	1 Dokumen	5.000.000		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Sumbar	1 Dokumen	5.000.000
2 11 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					2 11 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Sumbar	1 Dokumen	5.000.000		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Sumbar	1 Dokumen	5.000.000
2 11 01 1.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					2 11 01 1.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Sumbar	1 Dokumen	5.000.000		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Sumbar	1 Dokumen	5.000.000
2 11 01 1.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					2 11 01 1.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Sumbar	3 Laporan	5.000.000		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Sumbar	3 Laporan	5.000.000
2 11 01 1.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2 11 01 1.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Sumbar	4 Laporan	30.000.000		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Sumbar	4 Laporan	30.000.000
2 11 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.650.000.000	2 11 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.389.252.566
2 11 01 1.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2 11 01 1.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Sumbar	110 Orang/ Bulan	9.300.000.000		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Sumbar	110 Orang/ Bulan	9.034.292.566
2 11 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					2 11 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Sumbar	30 Dokumen	350.000.000		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Sumbar	30 Dokumen	354.960.000

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
2 11 01 1.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					2 11 01 1.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sumbar	100 Dokumen	0			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sumbar	100 Dokumen	0
2 11 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				115.000.000	2 11 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				115.000.000
2 11 01 1.03 0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					2 11 01 1.03 0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sumbar	18 Dokumen	115.000.000			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sumbar	18 Dokumen	115.000.000
2 11 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				93.250.000	2 11 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				93.250.000
2 11 01 1.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					2 11 01 1.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Sumbar	103 Paket	68.250.000			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Sumbar	103 Paket	68.250.000
2 11 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					2 11 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sumbar	7 Orang	25.000.000			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sumbar	7 Orang	25.000.000
2 11 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				500.000.000	2 11 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				474.663.000
2 11 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					2 11 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sumbar	12 Paket	5.000.000			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sumbar	12 Paket	5.000.000
2 11 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					2 11 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sumbar	8 Paket	40.000.000			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sumbar	8 Paket	14.663.000
2 11 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					2 11 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sumbar	12 Paket	75.000.000			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sumbar	12 Paket	75.000.000
2 11 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					2 11 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sumbar	12 Paket	30.000.000			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sumbar	12 Paket	30.000.000
2 11 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					2 11 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Sumbar	4 Dokumen	10.000.000			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Sumbar	4 Dokumen	10.000.000
2 11 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					2 11 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sumbar	18 Laporan	300.000.000			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sumbar	18 Laporan	300.000.000
2 11 01 1.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					2 11 01 1.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sumbar	10 Dokumen	20.000.000			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sumbar	10 Dokumen	20.000.000

RANCANGAN AWAL RKP						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
2 11 01 1.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					2 11 01 1.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sumbar	6 Dokumen	20.000.000			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sumbar	6 Dokumen	20.000.000
2 11 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				459.862.000	2 11 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				465.635.400
2 11 01 1.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					2 11 01 1.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Sumbar	1 Unit	50.000.000			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Sumbar	1 Unit	50.000.000
2 11 01 1.07 0005	Pengadaan Mebel					2 11 01 1.07 0005	Pengadaan Mebel				
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sumbar	8 Paket	50.000.000			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sumbar	8 Paket	54.675.200
2 11 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					2 11 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sumbar	13 Unit	200.000.000			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sumbar	13 Unit	201.098.200
2 11 01 1.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					2 11 01 1.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sumbar	1 Unit	159.862.000			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sumbar	1 Unit	159.862.000
2 11 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.805.000.000	2 11 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.085.908.034
2 11 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					2 11 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sumbar	20 Laporan	20.000.000			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sumbar	20 Laporan	20.000.000
2 11 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					2 11 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sumbar	12 Laporan	285.000.000			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sumbar	152.502 Laporan	285.000.000
2 11 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					2 11 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sumbar	38 Laporan	1.500.000.000			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sumbar	38 Laporan	1.780.908.034
2 11 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				530.000.000	2 11 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				529.910.000
2 11 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					2 11 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sumbar	17 Unit	200.000.000			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sumbar	17 Unit	200.000.000
2 11 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					2 11 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sumbar	20 Unit	50.000.000			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sumbar	20 Unit	49.910.000
2 11 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					2 11 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sumbar	30 Unit	100.000.000			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sumbar	30 Unit	100.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
2 11 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sumbar	20 Unit	30.000.000	2 11 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sumbar	20 Unit	30.000.000
2 11 01 1.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sumbar	1 Unit	150.000.000	2 11 01 1.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sumbar	1 Unit	150.000.000
2 11 02	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>				<b>227.318.000</b>	2 11 02	<b>PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP</b>				<b>227.318.000</b>
2 11 02 1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi				150.000.000	2 11 02 1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi				150.000.000
2 11 02 1.01 0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	Sumbar	19 Dokumen	100.000.000	2 11 02 1.01 0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	Sumbar	19 Dokumen	100.000.000
2 11 02 1.01 0006	Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi	Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali	Sumbar	1 Dokumen	50.000.000	2 11 02 1.01 0006	Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi	Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali	Sumbar	1 Dokumen	50.000.000
2 11 02 1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi				77.318.000	2 11 02 1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi				77.318.000
2 11 02 1.02 0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	Sumbar	1 Dokumen	25.000.000	2 11 02 1.02 0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	Sumbar	1 Dokumen	25.000.000
2 11 02 1.02 0007	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	Sumbar	19 Dokumen	52.318.000	2 11 02 1.02 0007	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	Sumbar	19 Dokumen	52.318.000
2 11 03	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>				<b>845.000.000</b>	2 11 03	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>				<b>845.000.000</b>
2 11 03 1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				580.000.000	2 11 03 1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				580.000.000
2 11 03 1.01 0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Sumbar	19 Dokumen	430.000.000	2 11 03 1.01 0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Sumbar	19 Dokumen	430.000.000
2 11 03 1.01 0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	Sumbar	19 Dokumen	150.000.000	2 11 03 1.01 0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	Sumbar	19 Dokumen	150.000.000
2 11 03 1.01 0005	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	Sumbar	1 Laporan	0	2 11 03 1.01 0005	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	Sumbar	1 Laporan	100.000.000



RANCANGAN AWAL RPKD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
2 11 03 1.01 0007	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	Sumbar	1 Laporan	0	2 11 03 1.01 0007	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	Sumbar	1 Laporan	150.000.000
2 11 03 1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				265.000.000	2 11 03 1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				265.000.000
2 11 03 1.03 0006	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	Sumbar	1 Kegiatan	250.000.000	2 11 03 1.03 0006	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	Sumbar	1 Kegiatan	250.000.000
2 11 03 1.03 0009	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kabupaten Sijunjung	2 Kegiatan	15.000.000	2 11 03 1.03 0009	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	Sumbar	2 Kegiatan	15.000.000
2 11 04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>				144.327.000	2 11 04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>				174.327.000
2 11 04 1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi				144.327.000	2 11 04 1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi				174.327.000
2 11 04 1.01 0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Danau singkarak (Kab. Solok dan Kab. Tanah Datar	100 Orang	60.000.000	2 11 04 1.01 0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Danau singkarak (Kab. Solok dan Kab. Tanah Datar	100 Orang	90.000.000
2 11 04 1.01 0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Kota Padang, Kota Sawahlunto, kota Solok dan Kab. Padang Pariaman,	15 Unit	25.000.000	2 11 04 1.01 0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Kota Padang, Kota Sawahlunto, kota Solok dan Kab. Padang Pariaman,	15 Unit	25.000.000
2 11 04 1.01 0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Kab. Agam dan Kab. Tanah Datar	25 Unit	59.327.000	2 11 04 1.01 0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Kab. Agam dan Kab. Tanah Datar	25 Unit	59.327.000
2 11 05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>				80.000.000	2 11 05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>				80.000.000
2 11 05 1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				80.000.000	2 11 05 1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				80.000.000
2 11 05 1.01 0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	19 Kabupaten / kota yang difasilitasi perizinan terkait pengelolaan limbah b3 (pertek/rintek)	20 Dokumen	80.000.000	2 11 05 1.01 0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	19 Kabupaten/kota yang di fasilitasi perizinan terkait pengelolaan limbah b3 nya (pertek dan rintek)	20 Dokumen	80.000.000
2 11 06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>				150.000.000	2 11 06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>				350.000.000
2 11 06 1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi				150.000.000	2 11 06 1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi				350.000.000
2 11 06 1.01 0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH					2 11 06 1.01 0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH				

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	19 kabupaten/kota (untuk persetujuan teknis) 5 Kab/Kota --> Pembinaan dan evaluasi kinerja penatalaksanaan pemeriksaan/penilaian dokumen lingkungan.	4 Dokumen	25.000.000			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	19 kabupaten/kota (untuk persetujuan teknis) 5 Kab/Kota --> Pembinaan dan evaluasi kinerja penatalaksanaan pemeriksaan/penilaian dokumen lingkungan.	- 8 dokumen (untuk persetujuan teknis) Sosialisasi PERTEK - 1 dokumen laporan Pembinaan	150.000.000
2 11 06 1.01 0005	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	19 Kab/Kota	100 Orang	50.000.000	2 11 06 1.01 0005	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	19 Kab/Kota	60 Orang	50.000.000
2 11 06 1.01 0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Padang Pariaman, Padang, Kab.Sijunjung, Kab.Pesisir Selatan, Kab.Lima Puluh Kota, Kab.Solok, Kab.Agam	3 Badan Usaha	75.000.000	2 11 06 1.01 0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Padang Pariaman, Padang, Kab.Sijunjung, Kab.Pesisir Selatan, Kab.Lima Puluh Kota, Kab.Solok, Kab.Agam	15 usaha dan/atau kegiatan	150.000.000
2 11 07	<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>				52.170.000	2 11 07	<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>				52.170.000
2 11 07 1.01	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH				37.170.000	2 11 07 1.01	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH				37.170.000
2 11 07 1.01 0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah data MHA Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Sumbar	1Dokumen	37.170.000	2 11 07 1.01 0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Sumbar	2 Dokumen	37.170.000
2 11 07 1.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH				15.000.000	2 11 07 1.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH				15.000.000
2 11 07 1.02 0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Sumbar	1 Dokumen	15.000.000	2 11 07 1.02 0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Sumbar	1 Dokumen	15.000.000
2 11 08	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>				340.977.000	2 11 08	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>				385.977.000
2 11 08 1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi				340.977.000	2 11 08 1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi				385.977.000

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
2 11 08 1.01 0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup					2 11 08 1.01 0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup				
		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	19 Kab/Kota	24 Dokumen	155.000.000			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	19 Kab/kota	30 Dokumen	200.000.000
2 11 08 1.01 0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi					2 11 08 1.01 0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi				
		Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	Sumbang	10 Orang	105.977.000			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	Sumbang	10 Orang	105.977.000
2 11 08 1.01 0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat					2 11 08 1.01 0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat				
		Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	19 kab/kota	6 lembaga	80.000.000			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	19 kab/kota	6 orang/lembaga/komunitas/kelompok	80.000.000
2 11 09	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>				107.434.000	2 11 09	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>				300.000.000
2 11 09 1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi				107.434.000	2 11 09 1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi				300.000.000
2 11 09 1.01 0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup					2 11 09 1.01 0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				
		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	19 Kab/Kota	22 Entitas	107.434.000			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	19 Kab/Kota	60 Entitas	300.000.000
2 11 10	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>				134.148.000	2 11 10	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>				280.000.000
2 11 10 1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi				134.148.000	2 11 10 1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi				280.000.000
2 11 10 1.01 0003	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi					2 11 10 1.01 0003	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi				
		Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	Kab. Sijunjung, Padang Pariaman, Padang	3 Perkara	20.489.000			Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	Kab. Sijunjung, Padang Pariaman, Padang	4 usaha dan/kegiatan	85.000.000
2 11 10 1.01 0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi					2 11 10 1.01 0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi				
		Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	19 Kab/kota	100 Pengaduan	113.659.000			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	19 Kab/Kota	20 pengaduan	195.000.000
	<b>UPTD Persampahan</b>				<b>4.290.632.000</b>		<b>UPTD Persampahan</b>				<b>4.290.632.000</b>
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				<b>4.290.632.000</b>	2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				<b>4.290.632.000</b>
2 11	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>				<b>4.290.632.000</b>	2 11	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>				<b>4.290.632.000</b>
2 11 11	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>				<b>4.290.632.000</b>	2 11 11	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>				<b>4.290.632.000</b>
2 11 11 1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional				4.290.632.000	2 11 11 1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional				4.290.632.000

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
2 11 11 1.01 0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	Sumbar	2 Unit	4.000.000.000	2 11 11 1.01 0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	Sumbar	2 Unit	4.000.000.000
2 11 11 1.01 0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	Sumbar	1 Dokumen	35.000.000	2 11 11 1.01 0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	Sumbar	1 Dokumen	35.000.000
2 11 11 1.01 0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	Sumbar	1 Unit	5.632.000	2 11 11 1.01 0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	Sumbar	1 Unit	5.632.000
2 11 11 1.01 0009	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan	Sumbar	1 Dokumen	250.000.000	2 11 11 1.01 0009	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan	Sumbar	1 Dokumen	250.000.000
						2 11 11 1.01 0014	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	19 kabupaten/kota	1 Dokumen	100.000.000
					<b>1.092.888.000</b>			<b>UPTD Laboratorium Lingkungan</b>			<b>1.092.888.000</b>
2					1.092.888.000	2					1.092.888.000
2 11					1.092.888.000	2 11					1.092.888.000
2 11 03					1.092.888.000	2 11 03					1.092.888.000
2 11 03 1.01					1.092.888.000	2 11 03 1.01					1.092.888.000
2 11 03 1.01 0015					1.092.888.000	2 11 03 1.01 0015					1.092.888.000
											1.092.888.000
					<b>2.966.065.000</b>			<b>UPTD Pengelolaan Limbah B3 Medis</b>			<b>2.966.065.000</b>
2					2.966.065.000	2					2.966.065.000
2 11					2.966.065.000	2 11					2.966.065.000
2 11 05					2.966.065.000	2 11 05					2.966.065.000
2 11 05 1.01					2.966.065.000	2 11 05 1.01					2.966.065.000
2 11 05 1.01 0002					2.966.065.000	2 11 05 1.01 0002					2.966.065.000

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan LB3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan LB3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Sumbar	1 Dokumen	2.966.065.000			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Sumbar	1 Dokumen	2.966.065.000
<b>TOTAL</b>					<b>23.646.071.000</b>	<b>TOTAL</b>					<b>24.259.996.000</b>

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat menerima usulan program/kegiatan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk Masyarakat, antara lain melalui pelaksanaan Forum OPD. Dari hasil pelaksanaan Forum OPD tersebut, terdapat beberapa usulan program/kegiatan sebagaimana tercantum pada tabel 2.5 di bawah ini. Sebagian dari usulan pemangku kepentingan tersebut bukan merupakan kewenangan dari Dinas LH Provinsi Sumatera Barat, yang kemudian akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan pihak lain yang terkait, dan sebagian lagi merupakan masukan penyempurnaan dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Tabel 2.5. Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No.	Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan
1.	Penyelesaian permasalahan sampah dan kelengkapan sarana/prasarana pada TPA	Kota Pariaman	1 paket	Keterbatasan anggaran pada Dinas LH Kota Pariaman
2.	Penguatan Masyarakat hukum adat	Kab. Limapuluh Kota, Kab. Pasaman	2 paket	Peluang pemanfaatan anggaran RBP BPD LH dengan bekerjasama dengan Lemtara
3.	Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Kab. Solok	5 nagari	Peluang pemanfaatan anggaran RBP BPD LH dengan bekerjasama dengan Lemtara
4.	Pembinaan dan penilaian <i>green campus</i> (kampus ramah lingkungan)	Sumatera Barat	1 paket	Pembinaan/penilaian yang ada sekarang baru ada untuk level pendidikan dasar dan menengah
5	Audit lingkungan hidup, khususnya pada kegiatan-kegiatan yang diduga akan berdampak signifikan terhadap lingkungan hidup	Sumatera Barat		Untuk lebih mengoptimalkan dampak dan memberikan rekomendasi yang lebih baik pada kebijakan lingkungan hidup yang akan diterbitkan kemudian hari.
6	Hilirisasi produk-produk daur ulang sampah	Sumatera Barat		Produk daur ulang sampah saat ini masih belum optimal pemasarannya
7	Optimalisasi Pengelolaan Sampah dimulai dari penghasil	Sumatera Barat		Pengelolaan sampah belum optimal
8	Pengawasan pertambangan secara berkala dan terkoordinasi	Sumatera Barat		Keterbatasan kewenangan dan anggaran pada kabupaten/kota
9	Kerjasama Pengelolaan sampah pada kawasan fly over – bandara BIM	Kab. Padang Pariaman		Keterbatasan anggaran pengelolaan sampah pada Kab. Padang Pariaman

## **Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Terdapat 5 Sasaran Utama Visi Indonesia 2045 yang termuat di dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045, yaitu:

1. Pendapatan per kapita setara negara maju
2. Kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang
3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat
5. Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*.

Dari kelima sasaran utama visi tersebut, maka pembangunan daerah bidang lingkungan hidup sangat terkait erat dengan sasaran ke-lima, yaitu 5. Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) menurun menuju *net zero emission*.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembangunan lingkungan hidup di daerah, yang mana untuk tahun 2025 dituangkan perencanaannya di dalam dokumen renja ini, adalah dimaksudkan untuk berkontribusi mencapai prioritas nasional ini.

Lebih lanjut dijabarkan bahwa untuk dapat mencapai sasaran utama tersebut dibutuhkan transformasi pembangunan lingkungan hidup yang meliputi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, perkuatan pembangunan infrastruktur untuk mencegah dan meminimalkan kerusakan alam serta mengendalikan pencemaran lingkungan, penguatan efektifitas tata kelola kawasan konservasi darat dan laut dalam mewujudkan kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia, pengembangan sistem pangan menuju eco-region system pangan yang berkelanjutan, sehat dan Tangguh berbasis sumber daya dan kearifan lokal.

Di dalam rancangan Renja Dinas LH 2025, telah ditetapkan beberapa program dan kegiatan yang akan sangat menunjang pencapaian sasaran nasional, maupun sasaran strategis daerah, meliputi:

- a. Program perencanaan lingkungan hidup;
- b. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati);
- d. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3);
- e. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- f. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH;



- g. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;
- h. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat;
- i. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup;
- j. Program pengelolaan persampahan.

Selain melalui sepuluh program di atas, Dinas Lingkungan Hidup dalam pencapaian sasaran tersebut di atas juga didukung oleh program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

#### Tujuan

Dalam rangka merespon dan menjawab isu dan permasalahan dalam urusan lingkungan hidup, maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Dinas LH Tahun 2021 – 2026 sesuai dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah:

1. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas; dan
2. Meningkatkan organisasi yang akuntabel dan melayani.

#### Sasaran

Sasaran merupakan tujuan yang akan dicapai dan bagian penting dalam Rencana Strategis Program dan Kegiatan Dinas LH Propinsi Sumatera Barat. Adapun sasaran yang ingin dicapai berikut dengan indikator kinerjanya adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	77,43	77,95	78,41	78,81	79,25
		Terwujudnya penataan lingkungan hidup	persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan	77	82	93	96	99
		Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	persentase penurunan beban pencemaran	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
			Persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
		Terwujudnya Optimalisasi Pengolahan Sampah dan Limbah B3	persentase penanganan sampah	56	58	60	62	64
			persentase pengurangan sampah	17	19	21	23	25
			jumlah limbah B3 yang dikelola (ton/tahun)	261.290	287.419	316.160	347.776	382.554



2.	Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	78	78,2	78,4	78,6	78,8
		Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	Tingkat kepuasan terhadap layanan Umum	86%	87%	88%	90%	93%
			Tingkat kepuasan terhadap layanan Kepegawaian	90%	91%	93%	93%	94%
			Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Aset	91%	92%	94%	96%	96%

### 3.3 Program dan Kegiatan

Tahun 2025 merupakan tahun keempat dari periode RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan Renstra DLH Tahun 2021 – 2026. Pada tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat berencana menjalankan 11 program sebagaimana telah direncanakan di dalam dokumen RPJMD dan Renstra PD 2021-2026, yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Penetapan program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 tersebut selain mengacu pada dokumen RPJMD/Renstra, juga didasarkan atas dinamika permasalahan lingkungan hidup aktual serta juga mengacu kepada kebijakan nasional, dalam hal ini KLHK.

Secara ringkas, untuk tahun 2025 terdapat 11 program (1 program penunjang urusan, 10 program urusan), 21 kegiatan (8 kegiatan penunjang urusan, 13 kegiatan urusan) dan 51 sub kegiatan (32 sub kegiatan penunjang urusan, 29 sub kegiatan urusan). Uraian rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026 dapat terlihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2  
Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
				LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA	SUMBER DANA		TARGET	KEBUTUHAN DANA
1	2	3	4	10	8	9	11	14	15	16
		<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>				<b>15.331.486.000,00</b>				<b>16.550.899.000,00</b>
	<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				<b>15.331.486.000,00</b>				<b>16.550.899.000,00</b>
	<b>2.11</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>				<b>15.331.486.000,00</b>				<b>16.550.899.000,00</b>
1,	<b>2.11.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	-		-	<b>13.215.619.000,00</b>			-	<b>14.328.132.000,00</b>
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	62.000.000,00		-	-	68.000.000,00
	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	7.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		8.000.000,00
	2.11.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.000.000,00
	2.11.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.000.000,00

	2.11.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.000.000,00
	2.11.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.000.000,00
	2.11.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.000.000,00
	2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		35.000.000,00
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		-	9.389.252.566,00		-	-	10.050.000.000,00
	2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	110 Orang/ Bulan	9.034.292.566,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		9.400.000.000,00
	2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Dokumen	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		350.000.000,00
	2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Dokumen	354.960.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-		300.000.000,00
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-		-	115.000.000,00		-	-	115.000.000,00

	2.11.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Dokumen	115.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		115.000.000,00
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		-	93.250.000,00		-	-	93.250.000,00
	2.11.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103 Paket	68.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		68.250.000,00
	2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Orang	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		25.000.000,00
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	474.663.000,00		-	-	760.000.000,00
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.000.000,00
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Paket	14.663.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		250.000.000,00
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	75.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		75.000.000,00
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		30.000.000,00
	2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		10.000.000,00

2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Laporan	300.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		350.000.000,00
2.11.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		20.000.000,00
2.11.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		20.000.000,00
2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	465.635.400,00		-	-	626.882.000,00
2.11.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00
2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Paket	54.675.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		25.000.000,00
2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Unit	201.098.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		250.000.000,00
2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	159.862.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		301.882.000,00
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	2.085.908.034,00		-	-	1.805.000.000,00
2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	20 Laporan	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		20.000.000,00

				Semua Kel/Desa						
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	152.502 Laporan	285.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		285.000.000,00
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38 Laporan	1.780.908.034,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.500.000.000,00
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	529.910.000,00		-	-	810.000.000,00
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17 Unit	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		200.000.000,00
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit	49.910.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		50.000.000,00
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Unit	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		380.000.000,00
	2.11.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		30.000.000,00
	2.11.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		150.000.000,00
2,	<b>2.11.02</b>	<b>PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP</b>	-		-	<b>227.318.000,00</b>			-	<b>238.207.000,00</b>

	2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	-		-	150.000.000,00		-	-	100.000.000,00
	2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19 Dokumen	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		100.000.000,00
	2.11.02.1.01.0006	Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi	Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00
	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	-		-	77.318.000,00		-	-	138.207.000,00
	2.11.02.1.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		25.000.000,00
	2.11.02.1.02.0007	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19 Dokumen	52.318.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		113.207.000,00
3,	<b>2.11.03</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	-		-	<b>845.000.000,00</b>		-	-	<b>925.000.000,00</b>
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-		-	580.000.000,00		-	-	610.000.000,00
	2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19 Dokumen	430.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		460.000.000,00
	2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19 Dokumen	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		150.000.000,00

	2.11.03.1.01.0005	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00
	2.11.03.1.01.0007	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00
	2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-		-	265.000.000,00		-	-	315.000.000,00
	2.11.03.1.03.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Kegiatan	250.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		300.000.000,00
	2.11.03.1.03.0009	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Kegiatan	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		15.000.000,00
4,	<b>2.11.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	-		-	<b>144.327.000,00</b>			-	<b>157.240.000,00</b>
	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	-		-	144.327.000,00		-	-	157.240.000,00
	2.11.04.1.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		66.000.000,00
	2.11.04.1.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Unit	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		25.000.000,00
	2.11.04.1.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Unit	59.327.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		66.240.000,00



5,	<b>2.11.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	-		-	<b>80.000.000,00</b>		-		<b>80.000.000,00</b>
	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-		-	80.000.000,00		-	-	80.000.000,00
	2.11.05.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Dokumen	80.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		80.000.000,00
6,	<b>2.11.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	-		-	<b>150.000.000,00</b>		-		<b>135.000.000,00</b>
	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	-		-	150.000.000,00		-	-	135.000.000,00
	2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		40.000.000,00
	2.11.06.1.01.0005	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00

	2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Badan Usaha	75.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		95.000.000,00
7,	<b>2.11.07</b>	<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>	-		-	<b>52.170.000,00</b>			-	<b>54.669.000,00</b>
	2.11.07.1.01	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	-		-	37.170.000,00		-	-	39.669.000,00
	2.11.07.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	37.170.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		39.669.000,00
	2.11.07.1.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	-		-	15.000.000,00		-	-	15.000.000,00
	2.11.07.1.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		15.000.000,00

8,	<b>2.11.08</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	-		-	<b>340.977.000,00</b>			-	<b>357.311.000,00</b>
	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	-		-	340.977.000,00			-	357.311.000,00
	2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Dokumen	155.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		159.000.000,00
	2.11.08.1.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	105.977.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		116.311.000,00
	2.11.08.1.01.0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Keluarga	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00
	2.11.08.1.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Lembaga	80.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		82.000.000,00
9,	<b>2.11.09</b>	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	-		-	<b>106.927.000,00</b>			-	<b>112.581.000,00</b>
	2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	-		-	106.927.000,00			-	112.581.000,00

	2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22 Entitas	106.927.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		112.581.000,00
10,	<b>2.11.10</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	-		-	<b>134.148.000,00</b>			-	<b>162.759.000,00</b>
	2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	-		-	134.148.000,00			-	162.759.000,00
	2.11.10.1.01.0003	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Perkara	20.489.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		43.655.000,00
	2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Pengaduan	113.659.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		119.104.000,00
11,	<b>2.11.11</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	-		-	<b>35.000.000,00</b>			-	<b>0,00</b>
	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	-		-	35.000.000,00			-	0,00
	2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19 Dokumen	35.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		0,00
		<b>UPTD PERSAMPAHAN</b>				<b>4.255.632.000,00</b>				<b>4.496.159.000,00</b>
	<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				<b>4.255.632.000,00</b>				<b>4.496.159.000,00</b>
	<b>2.11</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>				<b>4.255.632.000,00</b>				<b>4.496.159.000,00</b>
1,	<b>2.11.11</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	-		-	<b>4.255.632.000,00</b>			-	<b>4.496.159.000,00</b>

	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	-		-	4.255.632.000,00		-	-	4.496.159.000,00
	2.11.11.1.01.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	4.000.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		4.000.000.000,00
	2.11.11.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		20.000.000,00
	2.11.11.1.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	5.632.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		5.159.000,00
	2.11.11.1.01.0009	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	250.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		471.000.000,00
		<b>UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN</b>				<b>1.092.888.000,00</b>				<b>1.105.715.000,00</b>
	<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				<b>1.092.888.000,00</b>				<b>1.105.715.000,00</b>
	<b>2.11</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>				<b>1.092.888.000,00</b>				<b>1.105.715.000,00</b>
1,	<b>2.11.03</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	-		-	<b>1.092.888.000,00</b>			-	<b>1.105.715.000,00</b>
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-		-	1.092.888.000,00		-	-	1.105.715.000,00
	2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150 Dokumen	1.092.888.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		1.105.715.000,00
		<b>UPTD PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS</b>				<b>2.966.065.000,00</b>				<b>3.111.975.000,00</b>

	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.966.065.000,00				3.111.975.000,00
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				2.966.065.000,00				3.111.975.000,00
1,	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	-		-	2.966.065.000,00			-	3.111.975.000,00
	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-		-	2.966.065.000,00		-	-	3.111.975.000,00
	2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.966.065.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		3.111.975.000,00
	<b>J U M L A H</b>					<b>23.646.071.000,00</b>				<b>25.264.748.000,00</b>

## **Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Sesuai dengan dokumen Renstra, sebagaimana telah diuraikan juga di dalam tabel 2.4, DLH telah merencanakan kebutuhan anggaran sebesar Rp23.646.071.000, terdiri atas 1 program penunjang urusan dan 10 program urusan. Melihat dinamika dan perkembangan kondisi lingkungan hidup serta dengan memperhatikan kondisi-kondisi teraktual yang mempengaruhi besarnya anggaran pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan, anggaran sebesar tersebut masih belum optimal. Namun sungguhpun demikian, untuk menjaga konsistensi antara dokumen RPJMD, Renstra dengan Renja ini, maka hingga ditetapkannya RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025, rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan DLH tahun 2025 tetap mengikuti yang telah direncanakan sebelumnya di dalam dokumen Renstra, sebagaimana tabel 4.1 berikut:

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>						<b>15.331.486.000,00</b>							<b>16.550.899.000,00</b>	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						15.331.486.000,00							16.550.899.000,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						15.331.486.000,00							16.550.899.000,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	13.215.619.000,00						-	14.328.132.000,00	
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	62.000.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-	-	68.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		8.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njutan	-		5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				3 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				4 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	9.389.252.566,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	10.050.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				110 Orang/Bulan	9.034.292.566,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		9.400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				30 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				100 Dokumen	354.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	115.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	115.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				18 Dokumen	115.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		115.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	93.250.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	93.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				103 Paket	68.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		68.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				7 Orang	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	474.663.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	760.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				8 Paket	14.663.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				4 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				18 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				10 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				6 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang  Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	465.635.400,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	626.882.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				8 Paket	54.675.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				13 Unit	201.098.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	159.862.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		301.882.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan  Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.085.908.034,00			-	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	1.805.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				20 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				152.502 Laporan	285.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		285.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				38 Laporan	1.780.908.034,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		1.500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	529.910.000,00			-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-	-	810.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				17 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				20 Unit	49.910.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				30 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan	-		380.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				20 Unit	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	<b>2.11.02</b>	<b>PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP</b>	-	-			-	<b>227.318.000,00</b>						-	<b>238.207.000,00</b>	
	2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	-	-			-	150.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi</i>				19 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.01.0006	Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi														
			<i>Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	-	-			-	77.318.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	138.207.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD														
			<i>Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun</i>				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.02.0007	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang														
			<i>Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun</i>				19 Dokumen	52.318.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		113.207.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	2.11.03	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	-	-			-	<b>845.000.000,00</b>						-	<b>925.000.000,00</b>	
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-	-			-	580.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	610.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
			<i>Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</i>				19 Dokumen	430.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		460.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan</i>				19 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0005	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi														
			<i>Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim</i>				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0007	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi														
			<i>Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim</i>				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-	-			-	265.000.000,00			-	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	315.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.03.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi														
			<i>jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan</i>				1 Kegiatan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.03.0009	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan</i>				2 Kegiatan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	2.11.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	-	-			-	<b>144.327.000,00</b>						-	<b>157.240.000,00</b>	
	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi	-	-			-	144.327.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	157.240.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.1.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati														
			<i>Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati</i>				100 Orang	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		66.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.1.01.0008	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan														
			<i>Unit Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi</i>				15 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.1.01.0009	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya														
			<i>Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi</i>				25 Unit	59.327.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		66.240.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	-	-			-	80.000.000,00						-	80.000.000,00	
	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	80.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			<i>Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>				20 Dokumen	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	-	-			-	150.000.000,00						-	135.000.000,00	
	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	-	-			-	150.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	135.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH														
			<i>Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan</i>				4 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.1.01.0005	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya</i>				100 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			<i>Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi</i>				3 Badan Usaha	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		95.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	2.11.07	<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>	-	-			-	<b>52.170.000,00</b>						-	<b>54.669.000,00</b>	
	2.11.07.1.01	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	-	-			-	37.170.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	39.669.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.07.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH</i>				2 Dokumen	37.170.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		39.669.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.07.1.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	-	-			-	15.000.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.07.1.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan</i>				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	2.11.08	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	-	-			-	<b>340.977.000,00</b>						-	<b>357.311.000,00</b>	
	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	340.977.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	357.311.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup														
			<i>Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan</i>				24 Dokumen	155.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		159.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.1.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat</i>				10 Orang	105.977.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		116.311.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.1.01.0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat</i>				10 Keluarga	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.1.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH</i>				6 Lembaga	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		82.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	2.11.09	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	-	-			-	<b>106.927.000,00</b>						-	<b>112.581.000,00</b>	
	2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	106.927.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	112.581.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			<i>Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH</i>				22 Entitas	106.927.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		112.581.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10.	2.11.10	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	-	-			-	<b>134.148.000,00</b>						-	<b>162.759.000,00</b>	
	2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	-	-			-	134.148.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	162.759.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.1.01.0003	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi</i>				3 Perkara	20.489.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		43.655.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani</i>				100 Pengaduan	113.659.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		119.104.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
11.	2.11.11	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	-	-			-	<b>35.000.000,00</b>						-	<b>0,00</b>		
	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	-	-			-	35.000.000,00			-	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota															
			<i>Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota</i>				19 Dokumen	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		<b>UPTD PERSAMPAHAN</b>							<b>4.255.632.000,00</b>							<b>4.496.159.000,00</b>	
	2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>4.255.632.000,00</b>							<b>4.496.159.000,00</b>		
	2.11	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>						<b>4.255.632.000,00</b>							<b>4.496.159.000,00</b>		
1.	2.11.11	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	-	-			-	<b>4.255.632.000,00</b>						-	<b>4.496.159.000,00</b>		
	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	-	-			-	4.255.632.000,00			-	Meningkatkan pembanguan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	4.496.159.000,00	UPTD PERSAMPAHAN	
	2.11.11.1.01.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional															



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik</i>				2 Unit	4.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		4.000.000.000,00	UPTD PERSAMPAHAN	
	2.11.11.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional															
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan</i>				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		20.000.000,00	UPTD PERSAMPAHAN	
	2.11.11.1.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional															
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia</i>				1 Unit	5.632.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		5.159.000,00	UPTD PERSAMPAHAN	
	2.11.11.1.01.0009	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi															
			<i>Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan</i>				1 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		471.000.000,00	UPTD PERSAMPAHAN	
		<b>UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN</b>							<b>1.092.888.000,00</b>							<b>1.105.715.000,00</b>	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.092.888.000,00							1.105.715.000,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						1.092.888.000,00							1.105.715.000,00		
1.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-			-	1.092.888.000,00						-	1.105.715.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-	-			-	1.092.888.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	1.105.715.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN
	2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi														
			<i>Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan</i>				150 Dokumen	1.092.888.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		1.105.715.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN
		<b>UPTD PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS</b>						<b>2.966.065.000,00</b>							<b>3.111.975.000,00</b>	
	<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>2.966.065.000,00</b>							<b>3.111.975.000,00</b>	
	<b>2.11</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>						<b>2.966.065.000,00</b>							<b>3.111.975.000,00</b>	
1.	2.11.05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	-	-			-	<b>2.966.065.000,00</b>						-	<b>3.111.975.000,00</b>	
	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	2.966.065.000,00			-	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	3.111.975.000,00	UPTD PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS
	2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya</i>				1 Dokumen	2.966.065.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan pambangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	-		3.111.975.000,00	UPTD PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS
<b>J U M L A H</b>								<b>23.646.071.000,00</b>							<b>25.264.748.000,00</b>	

## **Bab V PENUTUP**

Renja DLH sebagai pedoman rencana kerja merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas untuk mendukung terwujudnya misi pemerintah daerah. Untuk tercapainya hasil seperti yang direncanakan dalam rencana kerja, diperlukan komitmen dan dukungan dari keseluruhan sumber daya manusia baik itu unsur pimpinan maupun staf yang ada, sebagai berikut:

1. Setiap pelaksana kegiatan pada bidang-bidang, UPTD dan sekretariat pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan pembangunan lingkungan hidup 2025 dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku.
2. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat berkewajiban untuk melaksanakan RENJA OPD ini sesuai dengan yang termuat di dalam visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan lingkungan hidup Provinsi Sumatera Barat.
3. Dinas Lingkungan Hidup berkewajiban menjamin konsistensi Renja 2024 dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 dan dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026.

Akhir kata, semoga Renja DLH Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 ini dapat dipedomani seutuhnya dan diimplementasikan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025.